



**BUPATI MAMUJU UTARA**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN  
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamuju Utara, perlu menyediakan alokasi anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara;
  - b. bahwa Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan guna melaksanakan program kerja pengawasan tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam bentuk satuan biaya sebagai standar biaya khusus kegiatan pengawasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 28.a Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara;
19. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara
2. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara
3. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
4. Inspektur ialah Kepala Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
5. Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan adalah akumulasi biaya komponen biaya yang dibayarkan secara lumsom kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
6. Lumsom adalah Uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua komponen biaya khusus kegiatan pengawasan.
7. Tugas Pengawasan adalah proses kegiatan dalam bentuk review, pendampingan, pemeriksaan, evaluasi, dan monitoring yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
8. Hari Pemeriksaan (HP) adalah Jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satu obyek pemeriksaan.

## **BAB II**

### **BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Komponen Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan terdiri dari :
  - a. Uang Harian :
    - Uang Makan
    - Uang Saku
  - b. Uang Penginapan
  - c. Uang Transportasi/BBM
  - d. Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan
  - e. Sewa Kendaraan
- (2) Komponen biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, b dan huruf c diberikan per hari berdasarkan lamanya Hari Pemeriksaan (HP).
- (3) Uang penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, hanya diberikan dalam hal pengawasan yang dilaksanakan pada Wilayah Kecamatan tertentu.
- (4) Dalam hal perhitungan dan pembayaran uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

- (5) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada penanggung jawab kegiatan pengawasan dan dibayar sesuai biaya riil dengan memperhatikan prinsip efisiensi anggaran.
- (6) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap Obyek yang diperiksa dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Penanggungjawab Sebesar Rp. 350.000,- per LHP
  - b. Koordinator Sebesar Rp. 300.000,- per LHP
  - c. Ketua Tim Sebesar Rp. 250.000,- per LHP
  - d. Anggota Tim Sebesar Rp. 150.000,- perorang per LHP

### **Pasal 3**

Uang makan, uang saku, uang transport, uang penginapan dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan kepada Tim Pengawas sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan selama melaksanakan tugas pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektifitas dan independensi.

### **Pasal 4**

Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan digolongkan dalam 4 (empat) Tingkatan :

- a. Penanggung jawab
- b. Koordinator
- c. Ketua Tim
- d. Anggota Tim

## **BAB III TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Inspektorat Kabupaten yang akan melaksanakan Tugas Pengawasan, terlebih dahulu harus memperoleh Surat Perintah Tugas dari Inspektur dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Inspektur atas nama Bupati.
- (2) Surat Perintah Tugas merupakan dasar diterbitkannya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (3) Surat Perintah Perjalanan Dinas merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan.

### **Pasal 6**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas pengawasan harus menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Bendahara Pengeluaran Inspektorat paling lambat 7 hari kerja setelah berakhirnya hari pemeriksaan.
- (2) Selain Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan, Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara Tim kepada Bupati dan ditembuskan kepada Pejabat/Instansi terkait paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya hari pemeriksaan.

## **BAB IV SANKSI**

### **Pasal 7**

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 di atas dikenakan sanksi berupa :

- a. Tidak diberi tugas pengawasan periode berikutnya, sebelum tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.
- b. Pengembalian Satuan Biaya Khusus yang telah diterima dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah, apabila secara mutlak yang diperintah tugaskan tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggung jawabnya.
- c. Pengembalian Satuan Biaya Khusus yang telah diterima dan disetorkan ke kas daerah apabila tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak diterbitkan sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Pengawasan dalam Wilayah Kabupaten, karena dalam keadaan tertentu membutuhkan Informasi, data atau Keterangan yang sangat penting di luar Wilayah Kabupaten, maka terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut berlaku ketentuan Standar Biaya Umum berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- (2) Pegawai Negeri Sipil di lingkup Inspektorat, yang melaksanakan tugas kedinasan di luar Kabupaten maupun di dalam Kabupaten yang tugas kedinasan dimaksud adalah bukan Tugas Pengawasan, maka kepadanya berlaku ketentuan Standar Biaya Umum berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- (3) Terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan ini, maka Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat, dibebankan pada biaya

Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Satuan Biaya Khusus Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 6 Januari 2014  
**BUPATI MAMUJU UTARA,**

**Ttd**

**H. AGUS AMBO DJIWA**

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 6 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**Ttd**

**H. M. NATSIR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 6**

